

FAKTOR DETERMINAN PENYEBAB NON PERFORMING FINANCING PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2008-2015¹⁾

Fary Adisetya Putra

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Email: fary-a-p-11@feb.unair.ac.id

Dr. Imron Mawardi

Departemen Ekonomi Syariah- Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Email: imron.mawardi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

The goal of this research is to determine the factors that caused the problematic funding of Bank Pembiayaan Rakyat Syariah in Indonesia during the period of 2008-2015. The method of research used is the quantitative approach. The sample of the research is Bank Pembiayaan Rakyat Syariah which is taken every three months for each variable during the period of 2008-2015. The analysis technique used is multiple regression analysis and the result is $Y = 5,076 - 0,743PDB + 0,018FDR + 0,047BOPO + 0,040Inflation + 0,024AverageFunding$, with R2 registration 0,749 or 74,9%.

The result of the partial test shows that economic growth has a significant effect. The result of the simultaneous test shows that the five variables have significant effects in the problematic funding of Bank Pembiayaan Rakyat Syariah in Indonesia.

Keywords: Problematic funding, Economic growth, Average Funding, Multiple regression, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat mayoritas percaya akan jasa bank dalam hal keuangan. Bank memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan, memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Fungsi tersebut diterapkan pada bank Konvensional dan bank Syariah. Namun ada perbedaan yang mendasar, yaitu di bank Syariah tidak ada bunga. Pendirian bank Syariah diawali dengan berdirinya tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam. Pendirian bank Syariah di

Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lokakarya " Bunga Bank dan Perbankan " di Cisarua, Bogor, 18 – 20 Agustus 1990. Bila pada periode tahun 1992 – 1998 hanya ada satu unit bank Syariah, pada tahun 2015 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam berbagai edisi) jumlah bank Syariah senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, terdiri atas 12 Bank Umum Syariah dengan jumlah kantor sebesar 1.990 dan 22 Unit Usaha Syariah jumlah kantor sebesar 311 yang mengalami penurunan. Selain itu pertumbuhan signifikan juga ditunjukkan dengan jumlah Bank Perkreditan Rakyat

¹⁾ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Fary Adisetya Putra, NIM: 041114131, yang diuji pada 10 April 2017

Syariah (BPRS) telah mencapai 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta dengan jumlah kantor sebesar 446 pada periode yang sama. (www.bi.go.id)

Pembiayaan menjadi salah satu alternatif yang membantu masyarakat dalam menjalankan suatu usaha. Beberapa produk pembiayaan antara lain murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, salam, isthisna, dan qard. Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank Syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. (Mulyono, 2004:4)

Di kutip dari Rani (2013), sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka

pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.

Terjadinya pembiayaan bank Syariah yang mengalami kemacetan, pada umumnya bergantung pada kinerja bank yang memberikan pembiayaan. Jika dikembalikan kepada ajaran Islam, maka terdapat beberapa ayat yang mengingatkan umat Islam untuk selalu mengevaluasi apa yang telah dikerjakan dan selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk melakukan evaluasi dan tanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al Hasyr (59) Ayat 18 dan QS. Al Muddastsir (38) Ayat 38, sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَنَسُوْا نَفْسَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Yā ayyuhallażina āmanuttaqullah waltanzur nafsummā qaddamat ligad, wattaqullaha innaallaha khabīrum bimā ta'malūn.

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Hasyr (59) : 18).

وَءِىۡ الْحٰرِیۡنَ مُقَرَّرٰنِیۡنَ فِیۡ الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

wa ā kharīna muqarranīna fil aṣfād.

Artinya : "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al Muddastsir (38) : 38).

Seperti hal yang diatas, telah disebutkan bahwa dalam pembiayaan pasti ada resikonya yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ.42/1999). Dikutip dari Rani (37:2013), dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami keterlambatan baik pokoknya maupun bagi hasil atau imbalannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang mencari tahu atau sebab mengapa pembiayaan bermasalah tersebut bisa terjadi.

Pembiayaan bermasalah di BPRS dan BUS/UUS sama-sama besar. Hanya saja, ekspansi pembiayaan di BUS/UUS cukup besar sehingga rasio NPF menjadi kecil. Di BUS/UUS, ekspansi pembiayaan dari Juli 2012 ke Juli 2013 mencapai sekitar 44 persen, sedangkan BPRS hanya 28,5 persen. Maka dari itu, seperti uraian diatas dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, inflasi, dan rentang kendali pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia ?
3. Apakah tingkat financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
4. Apakah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia ?
5. Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?
6. Apakah rentang kendali pembiayaan berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui apakah pertumbuhan

ekonomi, FDR, BOPO, inflasi, dan rentang kendali pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS Indonesia.

2. LANDASAN PUSTAKA

A. PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Indonesia memang memiliki peranan yang sangat penting. Karena pentingnya peranan ini, maka dalam menjalankan fungsinya perbankan akan menjalankan asas dan prinsip dengan hati-hati. Fungsi utama perbankan Indonesia sendiri adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. (UU No. 21 Tahun 2008)

Menurut UU No.10 Tahun 1998 Pasal 1 mengenai pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

C. PEMBIAYAAN

Menurut Mulyono (2004:4) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau dengan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran dilakukan atau ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

D. PEMBIAYAAN BERMASALAH

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh

tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

E. PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN PERMASALAH

Menurut Putong (2002), pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan akan stabil (sesuai Teori Keynes). Sebaliknya perekonomian mengalami krisis, maka tabungan masyarakat menjadi rendah dan konsumsi akan menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan dan semakin mahal dan langkanya barang – barang kebutuhan. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah.

H. FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH

Financing Deposit to Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Maka dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

I. BIAYA OPERASIONAL/PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH

Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menanggung beban operasional dengan pendapatan operasional perusahaan (Toni Wijaya, 2007). Menurut Dendawijaya (2009:98) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional BPRS, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Dari pengertian diatas, BOPO berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

J. INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH

Inflasi merupakan kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang – barang atau komoditas dan jasa. Huda dkk (2008:175) menjelaskan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

K. RENTANG KENDALI PEMBIAYAAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau dengan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran dilakukan atau ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Mulyono 2004:4). Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Ketika rentang kendali pembiayaan naik, maka pembiayaan bermasalah pun juga ikut naik karena total pembiayaan dan nasabahnya pun juga ikut meningkat yang mengakibatkan resiko pembiayaan bermasalah naik. Maka dapat disimpulkan rentang kendali pembiayaan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

G. HIPOTESIS

1. Pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi dan rentang kendali pembiayaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia
2. Pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi dan rentang kendali pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

H. MODEL ANALISIS



GAMBAR 1

MODEL ANALISIS

Model hubungan pembiayaan bermasalah dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Pembiayaan Bermasalah

a = Konstanta

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi

X₂ = *Financing to Deposit Ratio*

X₃ = BOPO

X₄ = Inflasi

X₅ = Rentang kendali pembiayaan

e = error terms

3. METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi, dan rentang kendali pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah bank

pembiayaan rakyat syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan.

B. IDENTIFIKASI VARIABEL

Variable bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, inflasi, dan rentang kendali pembiayaan. Sedangkan variabel terikatnya adalah pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

C. DEFINISI OPERASIONAL

Variabel-variabel yang digunakan tersebut definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pada penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Bank Indonesia. Sumber data diperoleh melalui website www.bi.go.id

2. *Financing to Deposit Ratio* (X_2)

Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya Sumber data dari Statistik Perbankan Syariah

Indonesia, diperoleh melalui website www.ojk.go.id.

3. Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) (X_3)

Rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional BPRS, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. biaya operasional BPRS yang terlalu tinggi atau sama dengan pendapatan operasional tidak akan mendatangkan keuntungan bagi BPRS. Sumber data dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia, diperoleh melalui website www.ojk.go.id.

4. Inflasi (X_4)

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Pada penelitian ini, inflasi diperoleh dari Bank Indonesia. Sumber data diperoleh melalui website www.bi.go.id

5. Rentang kendali pembiayaan (X_5)

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau dengan mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji

pembayaran dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Data dari rentang kendali pembiayaan ini diperoleh melalui website www.ojk.go.id

6. Pembiayaan Bermasalah (Y)

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pembiayaan atau kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan atau kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Data pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini diperoleh melalui website www.ojk.go.id

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan termasuk data *time series*. Data pada penelitian ini diperoleh dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan di ojk.go.id yang diambil periode 2008 hingga 2015

E. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yang diambil 32 data secara triwulan dengan periode 2008 hingga 2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel non acak

(*non probability sampling*) secara *purposive sampling*.

F. TEKNIK ANALISIS

Teknik analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Berdasarkan variabel yang digunakan maka hubungan antar variabel dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) \dots\dots\dots (3.1)$$

Bentuk persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e \dots(3.2)$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

X₁ = Pertumbuhan ekonomi

X₂ = Financing to Deposit Ratio

X₃ = BOPO

X₄ = Inflasi

X₅ = Rentang kendali pembiayaan

β₁ β₂ β₃ β₄ β₅ = Koefisien Regresi

e = Variabel Error

G. UJI PARSIAL (t-test)

Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel bebas secara dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat secara parsial. Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak dan Jika t hitung < t tabel berarti Ho diterima

H. UJI SIMULTAN (F-test)

Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari keseluruhan variabel bebas dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat secara simultan. Jika t hitung $>$ t tabel berarti H_0 ditolak dan Jika t hitung $<$ t tabel berarti H_0 diterima

I. ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam menganalisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) antara nol (0), dan 1 (satu).

J. UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji gejala heterokedastisitas juga dapat diketahui dengan menggunakan *scatter* analisis. Jika titik – titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas maka uji regresi tidak terkena asumsi heteroskedastis

2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) lebih dari 10 dan *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) kurang dari 10 dan

tolerance value lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3. UJI AUTOKORELASI

Gejala yang ditimbulkan oleh autokorelasi ini adalah terdapat korelasi antara varian error atau pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Menurut Santoso (2012), bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

4. UJI NORMALITAS

Uji normalitas ini digunakan untuk menganalisis apakah distribusi data pada variabel independen dan variabel normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk mengetahuinya adalah *probability plot*

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI MULTIKOLINEARITAS

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan oleh tabel 1

Tabel 1

UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji Multikolinieritas		
Variabel Bebas	Nilai VIF	Kesimpulan
FDR	1.070	Tidak terjadi Multikolinieritas
BOPO	4.266	Tidak terjadi Multikolinieritas
Inflasi	1.401	Tidak terjadi Multikolinieritas
PDB	1.306	Tidak terjadi Multikolinieritas
Rata-rata Pembiayaan	3.637	Tidak terjadi Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF pada variabel FDR, BOPO, Inflasi, PDB, rentang kendali pembiayaan terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikol.

2. UJI AUTOKOLERASI

Hasil uji autokolerasi ditunjukkan oleh tabel 2

TABEL 3
UJI AUTOKORELASI

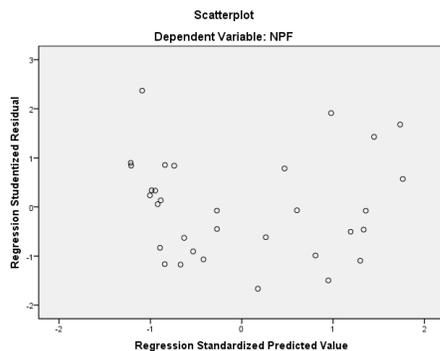
Uji Autokolerasi					
Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.865 ^a	.749	.701	.49935	.800

a. Predictors: (Constant), Rata-Rata Pembiayaan, Inflasi, FDR, PDB, BOPO
 b. Dependent Variable: NPF

Model regresi dikatakan bebas dari masalah autokorelasi apabila nilai output durbin-watson diantara -2 hingga +2. Berdasarkan output SPSS terlihat bahwa nilai DW sebesar 0,800 dan terletak diantara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yg diteliti terbebas dari masalah autokorelasi.

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Hasil uji heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh gambar berikut

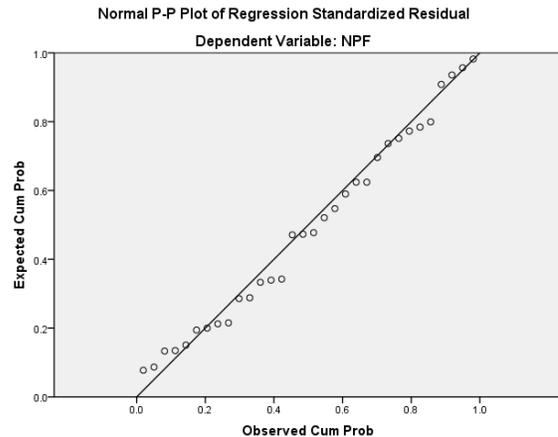


Berdasarkan gambar 1 titik-titik data tersebut menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. UJI NORMALITAS

Hasil uji normalitas akan ditunjukkan oleh gambar 2 berikut

Gambar 2
P-P PLOT Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 2 menunjukkan distribusi normal karena lingkaran-lingkaran kecil menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

B. Analisis Koefisien Determinasi Berganda

Nilai koefisien determinasi berganda dapat diketahui dari tabel 5 berikut ini

TABEL 5
Hasil Koefisien Determinasi Berganda

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.865 ^a	.749	.701	.49935	.800

a. Predictors: (Constant), Rata-Rata Pembiayaan, Inflasi, FDR, PDB, BOPO
 b. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel 4.18 terlihat bahwa R² sebesar 0,749 atau 74,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Rentang kendali pembiayaan dapat menjelaskan variabel pembiayaan bermasalah sebesar 74,9%, sedangkan sisanya sebesar 25,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar

model atau diluar variabel-variabel yang diteliti.

C. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

R² sebesar 0,749 atau 74,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, dan Rentang kendali pembiayaan dapat menjelaskan variabel pembiayaan bermasalah sebesar 74,9%, sedangkan sisanya sebesar 25,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model atau diluar variabel-variabel yang diteliti. Nilai regresi linier berganda dapat diketahui dari tabel 6 berikut ini

TABEL 6
REGRESI BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	5.076	3.584
FDR	.018	.021
BOPO	.047	.031
Inflasi	.040	.044
PDB	-.743	.136
Rata-Rata Pembiayaan	.024	.039

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan hasil dari tabel 6 maka persamaan regresi linier berganda dapat diperoleh sebagai berikut **Pembiayaan Bermasalah = 5,076 – 0,743PDB + 0,018FDR + 0,047BOPO + 0,040Inflasi + 0,024Rentang kendali pembiayaan**

D. UJI F

Hasil uji F ditunjukkan oleh tabel 7 berikut ini

TABEL 7
UJI F

A	p-value uji F	Interpretasi Hasil	Pengambilan Keputusan
0,05	0,021	p-value < 0,05	H ₀₁ ditolak

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, inflasi, dan rata-rata pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

E. UJI t

Variabel	A	p-value uji t	Interpretasi Hasil	Pengambilan Keputusan
Pertumbuhan Ekonomi	0,05	0,000	p-value < 0,05	H ₀₂ ditolak
FDR	0,05	0,386	p-value > 0,05	H ₀₂ diterima
BOPO	0,05	0,142	p-value > 0,05	H ₀₃ diterima
Inflasi	0,05	0,373	p-value > 0,05	H ₀₃ diterima
Rata-rata Pembiayaan	0,05	0,543	p-value > 0,05	H ₀₃ diterima

Berdasarkan tabel 4.20, maka pengujian terhadap hipotesis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki p-value uji t lebih kecil dari α (0,000 < 0,05), sehingga H₀₅ ditolak. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah PDB berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah.
2. Variabel FDR memiliki p-value uji t lebih besar dari α (0,386 > 0,05), sehingga H₀₂ diterima. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah.
3. Variabel BOPO memiliki p-value uji t lebih besar dari α (0,142 > 0,05), sehingga H₀₃ diterima. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah BOPO berpengaruh tidak

signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah.

4. Variabel Inflasi memiliki p-value uji t lebih besar dari α ($0,373 > 0,05$), sehingga H_0 diterima. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

5. Variabel rentang kendali pembiayaan memiliki p-value uji t lebih besar dari α ($0,543 > 0,05$), sehingga H_0 diterima. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah rentang kendali pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

F. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, dan Rentang kendali pembiayaan Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi, dan Rentang kendali pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini terlihat dari p-value uji F lebih kecil dari α ($0,021 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, FDR, BOPO, Inflasi, dan Rentang kendali pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap BPRS harus

tetap memantau faktor internal yang berupa rasio dan faktor eksternal yang berupa inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Pengaruh PDB terhadap NPF secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa p-value dari PDB lebih kecil dari α ($0,000 > 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah tingkat pertumbuhan PDB. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ahmed (2006) yang menunjukkan bahwa GDP berpengaruh signifikan terhadap NPL.

3. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan

Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Pengaruh FDR terhadap NPF secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa p-value dari FDR lebih besar dari α ($0,386 > 0,05$), sehingga H02 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

FDR merupakan rasio yang menggambarkan tentang besarnya pembiayaan yang diberikan BPRS dibandingkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS, sehingga FDR juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan BPRS sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana dengan dana yang berhasil dihimpun oleh BPRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

4. Pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Pengaruh BOPO terhadap NPF secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa

p-value dari BOPO lebih besar dari α ($0,142 > 0,05$), sehingga H03 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

BOPO menunjukkan tentang tingkat efisiensi operasional BPRS. Apabila nilai rasio BOPO menunjukkan nilai yang semakin tinggi, maka dapat dikatakan bank tidak beroperasi secara efisien karena bank mengeluarkan biaya operasional yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Apabila BOPO semakin rendah, maka bank telah beroperasi secara efisien yang artinya biaya operasional yang dikeluarkan bank dalam jumlah yang efisien.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF. Hal tersebut dapat disebabkan karena nilai rata-rata BOPO pada periode penelitian sebesar 79,95% yang artinya masih dibawah ketetapan nilai maksimal OER BPRS seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, yakni 87%. Dengan nilai rata-rata yang masih dibawah ketentuan dari Bank Indonesia, maka dapat disimpulkan secara industri, BPRS sudah mencapai efisiensi operasi yang baik dan stabil sehingga hal tersebut tidak menyebabkan perubahan pada NPF.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah (2014) yang menyatakan BOPO berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa efisiensi penyaluran pembiayaan tidak lantas mengurangi rasio NPF. Ini dikarenakan urusan NPF adalah urusan luar bank yang berhubungan dengan masyarakat dalam membayar kewajibannya bukan tergantung pada efisiensi penyalurannya.

5. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Pengaruh Inflasi terhadap NPF secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa p-value dari Inflasi lebih besar dari α ($0,373 > 0,05$), sehingga H_0 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Hasil pada penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah (2014) yang menyatakan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa BPRS saat inflasi naik maka kemampuan daya beli masyarakat menurun, namun menurunkan pula tingkat kemacetan dalam melunasi utang pembiayaan, padahal secara teori jika kekuatan perekonomian masyarakat melemah maka makin tidak mampu masyarakat dalam membayar kewajibannya.

6. Pengaruh Rentang kendali pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia

Pengaruh Rentang kendali pembiayaan terhadap NPF secara parsial dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t. Hasil dari pengolahan data, terlihat bahwa p-value dari Rentang kendali pembiayaan lebih besar dari α ($0,543 > 0,05$), sehingga H_0 diterima. Kesimpulan yang dapat diambil adalah berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Rentang kendali pembiayaan ini melihat seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Rentang kendali pembiayaan ini diperoleh dari jumlah pembiayaan dibagi dengan jumlah nasabah yang ada di BPRS di Indonesia. Rentang kendali pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah dapat

disebabkan pihak BPRS sudah melakukan tindakan untuk menghindari pembiayaan bermasalah terjadi ketika factor rentang kendali pembiayaan ini meningkat, yaitu dengan cara repayment capacity. Repayment capacity adalah penilaian kesanggupan membayar kembali kredit apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. Hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh, watak yang dimiliki oleh nasabah. Dengan repayment capacity, BPRS dapat mengurangi kemungkinan pembiayaan yang terjadi pada nasabahnya.

BAB 5 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi, Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, dan Rentang kendali pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia.
2. Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Inflasi, dan Rentang kendali pembiayaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia.

3. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan BPRS terus memantau pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas jasa keuangan sebagai regulator lembaga keuangan harus terus memantau setiap kinerja BPRS diseluruh Indonesia dan secara cepat memberikan evaluasi kepada BPRS yang dirasa tidak berjalan lancar agar kepentingan nasabah terlindungi dan keberlangsungan usaha BPRS tetap terjamin.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan menggunakan variabel lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BPRS

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya (revisi terbaru Departemen Agama RI dengan Transliterasi Arab-Latin (rummy)). 2000. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. Menejemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Anshori, Muslich & Iswati, Sri. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya : Airlangga University Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2010. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta:Tazkia Cendekia.
- Ariyani, Desi. 2009. Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Januari: 2005 – April: 2008). Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ascarya. 2013. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashari dan Saptana. 2005. "Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian". Paper. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan Ed. 2. Bogor : Galia Indonesia.
- Firmansyah, Irman. 2013. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia. Jurnal. Tasikmalaya Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. Current Issue Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 31, tentang Akuntansi Perbankan (revisi 2000), Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Jusmaliani. 2008. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono, Pudjo Teguh. 2004. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Putong, Iskandar. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi Kedua. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rani, Lina. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wijaya, Tony. 2007. Hubungan Adversity Intelligence dengan Intensi Berwirausaha (Studi Empiris pada siswa SMKN 7 Yogyakarta). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan .9.2.:117-127.
- www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016)
- www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/indonesia/Default.aspx (diakses pada tanggal 12 Oktober 2016)